

ARAH BARU GLOBALISASI

DAN PENGARUHNYA TERHADAP

PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN



OLEH
RUDY C TARUMINGKENG

Rudy C Tarumingkeng: **Arah Baru Globalisasi dan Pengaruhnya
terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

3 April 2026

ARAH BARU GLOBALISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Abstrak

Globalisasi pada abad ke-21 tidak sedang berhenti, tetapi sedang berubah bentuk. Jika pada fase sebelumnya globalisasi terutama ditandai oleh liberalisasi perdagangan, mobilitas modal, dan fragmentasi rantai produksi berbasis efisiensi biaya, maka pada fase mutakhir arahnya semakin ditentukan oleh standar, digitalisasi, ketahanan rantai pasok, transisi hijau, dan politik industrial baru. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027, menandakan bahwa ekonomi dunia masih bertumbuh, walaupun di bawah tekanan ketidakpastian kebijakan dan fragmentasi global. WTO juga memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan barang dunia melambat dari 4,6 persen pada 2025 menjadi 1,9 persen pada 2026, sementara perdagangan jasa komersial tetap lebih tangguh, tumbuh 4,8 persen pada 2026. Fakta ini menunjukkan bahwa globalisasi tetap berlanjut, tetapi pusat gravitasnya bergeser dari arus barang semata menuju kombinasi barang, jasa, data, standar, dan teknologi. ([IMF](#))

Pada saat yang sama, perubahan arah globalisasi berlangsung di tengah krisis pembangunan berkelanjutan yang belum terselesaikan. Laporan SDGs 2025 dari PBB menunjukkan bahwa hanya 35 persen target SDGs

yang berada di jalur atau mengalami kemajuan moderat; hampir setengah bergerak terlalu lambat, dan 18 persen bahkan berada di bawah garis dasar 2015. OECD memperingatkan bahwa tanpa reformasi besar, kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan dapat membengkak menjadi US\$6,4 triliun pada 2030. Dengan demikian, pertanyaan utama bukan lagi apakah globalisasi perlu dilanjutkan atau dihentikan, melainkan bagaimana arah baru globalisasi dapat diatur agar menopang pembangunan yang lebih hijau, lebih inklusif, dan lebih tahan krisis. ([UNSD](#))

Makalah ini berargumen bahwa arah baru globalisasi memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia membuka peluang baru melalui perdagangan jasa, ekonomi digital, inovasi teknologi, investasi energi bersih, dan penyebaran standar yang dapat meningkatkan mutu, efisiensi, dan interoperabilitas. World Bank menegaskan bahwa hampir 90 persen perdagangan dunia kini dibentuk oleh langkah-langkah non-tarif, yang sebagian besar terkait standar. IEA juga menunjukkan bahwa investasi energi global pada 2025 diperkirakan mencapai US\$3,3 triliun, dengan sekitar US\$2,2 triliun mengalir ke energi bersih, dua kali lipat investasi ke bahan bakar fosil. Di sisi lain, arah baru globalisasi juga membawa risiko: konsentrasi teknologi, ketimpangan akses investasi, tekanan standar terhadap negara berkembang, dan fragmentasi tata kelola global. UNCTAD melaporkan bahwa FDI global turun 11 persen pada 2024 menjadi US\$1,5 triliun, menandakan bahwa integrasi ekonomi internasional tetap rapuh dan tidak otomatis mendukung pembangunan jangka panjang. ([World Bank](#))

Melalui pendekatan kualitatif-analitis berbasis literatur mutakhir dari IMF, WTO, World Bank, UNCTAD, OECD, IEA, UNDP, WIPO, dan PBB, makalah ini menunjukkan bahwa globalisasi masa depan tidak lagi cukup dipahami sebagai perluasan pasar. Ia harus dibaca sebagai arena perebutan standar, data, teknologi, pembiayaan, dan legitimasi pembangunan. Implikasi utamanya adalah bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila negara mampu menata keterbukaan ekonomi secara strategis: menghubungkan globalisasi dengan transformasi struktural,

inovasi domestik, transisi hijau, dan perluasan kapabilitas manusia. Dengan kata lain, arah baru globalisasi hanya akan menjadi kekuatan pembangunan apabila dikelola bukan semata untuk pertumbuhan, tetapi untuk keberlanjutan dan keadilan antargenerasi. ([World Bank](#))

Kata Kunci

globalisasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, perdagangan internasional, standar global, transisi hijau, ekonomi digital, investasi, inovasi, SDGs, tata kelola global

Arah Baru Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

1. Pendahuluan

Selama beberapa dekade, globalisasi dipandang sebagai kekuatan utama yang menghubungkan pasar, investasi, produksi, dan konsumsi lintas negara. Narasi dominan masa itu menekankan liberalisasi tarif, integrasi rantai pasok global, dan efisiensi alokasi sumber daya. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, globalisasi mengalami perubahan watak yang nyata. IMF memperkirakan pertumbuhan global tetap berada pada 3,3 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027, tetapi stabilitas itu terjadi dalam konteks “divergent forces,” yakni kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan: investasi teknologi menopang pertumbuhan, tetapi ketegangan kebijakan dagang, konflik geopolitik, dan ketidakpastian tetap membebani prospek dunia. Artinya, integrasi global masih berlangsung, tetapi tidak lagi berada dalam iklim yang mulus dan seragam. ([IMF](#))

WTO memperlihatkan perubahan struktural yang sama. Dalam *Global Trade Outlook and Statistics* Maret 2026, WTO mencatat bahwa volume

perdagangan barang dunia tumbuh 4,6 persen pada 2025, tetapi diproyeksikan melambat menjadi 1,9 persen pada 2026 sebelum pulih sebagian pada 2027. Sebaliknya, perdagangan jasa komersial diperkirakan tetap tumbuh lebih tinggi, yaitu 4,8 persen pada 2026 dan 5,1 persen pada 2027. Ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak lagi semata bertumpu pada pertukaran barang fisik, tetapi semakin dipacu oleh jasa, digitalisasi, dan aktivitas berintensitas pengetahuan. ([World Trade Organization](#))

Dalam saat yang sama, pembangunan berkelanjutan menghadapi tantangan serius. PBB melaporkan bahwa setelah satu dekade Agenda 2030 berjalan, hanya 35 persen target SDGs yang berada di jalur atau menunjukkan kemajuan moderat; hampir setengahnya bergerak terlalu lambat dan 18 persen bahkan memburuk dibanding garis dasar 2015. Konflik, perubahan iklim, meningkatnya ketimpangan, dan tingginya biaya pembayaran utang menjadi penghambat utama. Gambaran ini memperlihatkan bahwa keterbukaan ekonomi global tidak otomatis menghasilkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. ([UNSD](#))

Karena itu, makalah ini berangkat dari sebuah pertanyaan pokok: bagaimana arah baru globalisasi memengaruhi pembangunan ekonomi berkelanjutan? Pertanyaan ini penting karena dunia tidak lagi cukup dijelaskan oleh dikotomi “pro-globalisasi” versus “anti-globalisasi.” Yang lebih relevan ialah memahami bentuk baru globalisasi, peluang apa yang dibukanya, risiko apa yang ditimbulkannya, dan strategi apa yang dibutuhkan agar keterhubungan global mendukung kesejahteraan jangka panjang, bukan sekadar pertumbuhan jangka pendek. ([World Bank](#))

Tesis utama makalah ini adalah bahwa arah baru globalisasi ditandai oleh lima pergeseran besar: dari liberalisasi tarif ke dominasi standar; dari perdagangan barang ke perdagangan jasa dan data; dari efisiensi biaya ke ketahanan dan keamanan rantai pasok; dari energi fosil ke investasi hijau; dan dari pasar yang tampak netral ke ekonomi global yang semakin dipengaruhi kebijakan industri dan tata kelola teknologi. Pergeseran ini dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan bila dihubungkan dengan

inovasi, pembiayaan hijau, dan transformasi produktif domestik. Namun jika tidak, globalisasi baru justru dapat memperdalam ketimpangan antarnegara dan antarkelompok sosial. ([World Bank](#))

2. Globalisasi Klasik dan Keterbatasannya

Globalisasi klasik dibangun di atas keyakinan bahwa keterbukaan perdagangan dan investasi akan memperbesar efisiensi, meningkatkan pertumbuhan, dan pada akhirnya meneteskan manfaat kepada masyarakat luas. Dalam model ini, perusahaan memecah proses produksi ke berbagai negara, mencari upah lebih murah, memanfaatkan perbedaan kebijakan, dan mengoptimalkan logistik global. Negara berkembang masuk ke jaringan ini terutama sebagai penyedia tenaga kerja murah, bahan baku, atau lokasi manufaktur berbiaya rendah. Model ini memang berhasil memperbesar volume perdagangan dunia dan mempercepat industrialisasi di beberapa wilayah. Namun, model tersebut juga memperlihatkan kelemahan besar ketika dihadapkan pada krisis keuangan, pandemi, konflik geopolitik, dan krisis iklim. ([World Trade Organization](#))

Kelemahan pertama ialah bahwa globalisasi klasik cenderung terlalu menekankan efisiensi dan terlalu sedikit memperhatikan ketahanan. Krisis rantai pasok global menunjukkan bahwa sistem yang terlalu ramping dan sangat tersebar secara geografis rentan terhadap gangguan. Kelemahan kedua adalah pengabaian biaya sosial dan ekologis. Ketika harga murah menjadi prioritas tertinggi, eksploitasi lingkungan, emisi tinggi, upah rendah, dan lemahnya perlindungan sosial mudah dianggap sebagai “biaya eksternal.” Kelemahan ketiga ialah ketimpangan. Keuntungan globalisasi tidak tersebar merata; negara dan perusahaan yang lebih siap secara teknologi dan institusional memperoleh porsi manfaat yang jauh lebih besar. ([UNSD](#))

UNCTAD dalam *World Investment Report 2025* menunjukkan bahwa investasi global justru turun 11 persen pada 2024 menjadi US\$1,5 triliun. Penurunan ini bukan sekadar siklus biasa, tetapi juga mencerminkan lingkungan global yang makin tidak pasti. Infrastruktur dan investasi

industri mengalami tekanan, sementara negara berkembang—yang paling membutuhkan modal untuk transformasi—sering kali tertinggal. Fakta ini menantang asumsi lama bahwa pasar global akan selalu mengalokasikan modal ke tempat yang paling produktif secara sosial. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Dengan demikian, globalisasi klasik tidak dapat lagi dijadikan acuan tanpa koreksi. Tantangan pembangunan berkelanjutan menuntut bentuk integrasi global yang berbeda: lebih sadar risiko, lebih peka pada standar, lebih terhubung dengan transisi hijau, dan lebih mampu memperluas nilai tambah domestik. Di sinilah arah baru globalisasi mulai terlihat. ([UNSD](#))

3. Arah Baru Globalisasi: Dari Tarif ke Standar

Salah satu perubahan paling mendasar dalam globalisasi kontemporer adalah bergesernya titik berat dari tarif ke standar. World Development Report 2025 menegaskan bahwa hampir 90 persen perdagangan dunia kini dibentuk oleh langkah-langkah non-tarif, yang sebagian besar terkait standar. Ini berarti akses ke pasar internasional semakin ditentukan bukan hanya oleh harga dan kuantitas, tetapi oleh kemampuan memenuhi spesifikasi teknis, ketentuan keselamatan, interoperabilitas sistem, pelaporan, jejak karbon, dan mekanisme verifikasi. ([World Bank](#))

Standar dalam konteks ini bukan sekadar aturan teknis yang netral. Standar adalah “infrastruktur tersembunyi” yang menentukan siapa dapat berpartisipasi dalam pasar, dengan kualitas apa, dan pada nilai tambah berapa. Dari sistem pembayaran digital hingga stasiun pengisian kendaraan listrik, teknologi baru hanya menghasilkan manfaat ekonomi skala luas jika standar tersedia dan diakui. Karena itu, negara atau perusahaan yang mampu menulis, mengadopsi, dan menegakkan standar akan memiliki posisi lebih kuat dalam ekonomi global. ([World Bank](#))

Bagi pembangunan berkelanjutan, dominasi standar ini memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, standar dapat meningkatkan mutu, keselamatan, efisiensi energi, dan perlindungan lingkungan. Mereka juga memudahkan

konsumen, investor, dan regulator membandingkan kinerja antarproduk dan antarperusahaan. Di sisi lain, standar dapat menjadi penghalang masuk baru bagi negara berkembang yang belum memiliki laboratorium, sistem akreditasi, sertifikasi, dan kapasitas regulasi yang memadai. Dengan kata lain, arah baru globalisasi membuka peluang peningkatan kualitas, tetapi juga risiko eksklusi baru. ([World Bank](#))

Di sinilah terlihat bahwa pembangunan berkelanjutan tidak cukup dengan memperluas perdagangan. Yang juga dibutuhkan adalah pembangunan kapasitas standar: kualitas data, lembaga metrologi, sistem sertifikasi, kemampuan audit, dan tata kelola regulasi. Negara yang gagal membangun kapasitas ini akan tertinggal, bukan karena tidak memiliki produk, tetapi karena tidak mampu membuktikan mutu dan keberlanjutannya. ([World Bank](#))

4. Dari Barang ke Jasa, Data, dan Ekonomi Digital

Arah baru globalisasi juga tampak pada pergeseran dari dominasi perdagangan barang menuju meningkatnya peran jasa, data, dan ekonomi digital. WTO mencatat bahwa dalam skenario dasar 2026, perdagangan jasa komersial tetap tumbuh 4,8 persen, jauh di atas pertumbuhan perdagangan barang sebesar 1,9 persen. Perubahan ini penting karena jasa modern—termasuk logistik, perangkat lunak, komputasi awan, konsultasi, desain, pendidikan daring, dan layanan keuangan digital—memiliki intensitas pengetahuan yang tinggi dan semakin menentukan daya saing lintas negara. ([World Trade Organization](#))

UNCTAD menunjukkan bahwa ekonomi digital tumbuh sekitar 10–12 persen per tahun, lebih cepat daripada pertumbuhan PDB global, dan rata-rata menarik investasi internasional sekitar US\$122 miliar per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Namun pertumbuhan ini sangat terkonsentrasi: sepuluh negara menyerap sekitar 80 persen proyek digital baru. Artinya, digitalisasi memang menciptakan peluang besar, tetapi tanpa pemerataan kapasitas, ia dapat memperkeras ketimpangan global. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Ekonomi digital juga mengubah makna pembangunan berkelanjutan. Bila sebelumnya pembangunan sering diukur dari industrialisasi fisik dan ekspor barang, kini kapabilitas digital—termasuk konektivitas, komputasi, pengelolaan data, layanan digital publik, dan literasi teknologi—menjadi bagian inti dari daya saing berkelanjutan. Dalam konteks ini, negara berkembang menghadapi tantangan ganda: memperluas inklusi digital di dalam negeri sekaligus membangun posisi tawar di pasar digital global.

([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

UNDP dalam *Human Development Report 2025* menekankan bahwa masa depan pembangunan dalam era AI bergantung lebih sedikit pada apa yang AI dapat lakukan dan lebih banyak pada pilihan manusia dalam membentuk ekonomi dan masyarakat agar mampu memanfaatkannya. Ini adalah koreksi penting terhadap pandangan deterministik. Globalisasi digital dapat mendukung pembangunan berkelanjutan jika dihubungkan dengan pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan perluasan akses. Tetapi tanpa desain kebijakan yang sadar tujuan, ia justru dapat memusatkan nilai pada sedikit perusahaan dan sedikit negara. ([Human Development Reports](#))

5. Dari Efisiensi Biaya ke Ketahanan dan Keamanan Rantai Pasok

Dalam globalisasi lama, perusahaan dan negara cenderung mengutamakan biaya serendah mungkin. Dalam globalisasi baru, pertimbangan ketahanan, keamanan, dan diversifikasi makin penting. Ketegangan geopolitik, guncangan logistik, serta kerentanan energi telah mendorong perusahaan dan pemerintah menilai ulang arsitektur rantai pasok. WTO dan IMF sama-sama menunjukkan bahwa prospek perdagangan dan pertumbuhan kini sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian kebijakan dan risiko geopolitik.

([World Trade Organization](#))

Perubahan ini memiliki dampak langsung terhadap pembangunan berkelanjutan. Di satu sisi, fokus pada ketahanan dapat mendorong reshoring, friend-shoring, atau diversifikasi pemasok yang mengurangi risiko konsentrasi dan membuka peluang bagi negara-negara baru masuk

ke rantai nilai. Di sisi lain, bila keamanan ekonomi diartikan terlalu sempit, dunia dapat bergerak ke arah fragmentasi yang mengurangi efisiensi, menaikkan biaya, dan mempersempit ruang pembangunan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Bagi pembangunan berkelanjutan, ketahanan yang sehat seharusnya tidak dipahami sebagai penutupan diri, melainkan sebagai pembangunan kapasitas domestik yang lebih kuat dalam sistem yang tetap terbuka. Negara perlu memiliki basis industri, energi, dan data yang cukup tangguh untuk tidak terlalu rentan, tetapi sekaligus tetap terhubung dengan arus pengetahuan, investasi, dan perdagangan internasional. Dengan demikian, arah baru globalisasi memerlukan keseimbangan antara keterbukaan dan kapasitas nasional. ([World Bank](#))

6. Globalisasi Hijau: Dari Energi Fosil ke Investasi Bersih

Perubahan berikutnya adalah munculnya globalisasi hijau. IEA melaporkan bahwa investasi energi global pada 2025 diperkirakan mencapai US\$3,3 triliun, dengan sekitar US\$2,2 triliun mengalir ke energi bersih—mencakup energi terbarukan, nuklir, jaringan listrik, penyimpanan, bahan bakar rendah emisi, efisiensi, dan elektrifikasi—atau dua kali lipat investasi ke minyak, gas, dan batu bara. Ini menandakan bahwa arsitektur modal global mulai semakin condong ke arah transisi rendah karbon. ([IEA](#))

UNCTAD juga mendorong agar perdagangan dan investasi diintegrasikan dengan rencana iklim nasional. Dalam panduannya tentang kebijakan perdagangan untuk memajukan NDC, UNCTAD menekankan bahwa transformasi lintas sektor diperlukan untuk menurunkan emisi, memperkuat resiliensi, dan memobilisasi sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Dengan kata lain, globalisasi tidak lagi dapat dipisahkan dari agenda iklim; perdagangan, investasi, standar teknis, dan kebijakan industri semakin menjadi instrumen transisi. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Globalisasi hijau membuka peluang besar bagi pembangunan berkelanjutan. Negara dapat menarik investasi untuk energi terbarukan, manufaktur komponen hijau, sistem transportasi listrik, dan efisiensi sumber daya. Teknologi bersih dapat menurunkan biaya energi dalam jangka panjang, memperbaiki kualitas lingkungan, dan menciptakan sektor baru bagi tenaga kerja. Namun peluang ini tidak otomatis terbagi rata. Negara yang lebih maju dalam teknologi, pembiayaan, dan kebijakan industri akan lebih dulu memperoleh manfaat terbesar. ([IEA](#))

Risiko lainnya ialah munculnya proteksionisme hijau. Standar emisi, kebijakan perbatasan karbon, dan subsidi hijau domestik dapat mendorong dekarbonisasi, tetapi juga berpotensi membebani negara berkembang yang kapasitas pemenuhan standarnya belum matang. Karena itu, globalisasi hijau hanya akan mendukung pembangunan berkelanjutan bila tata kelolanya disertai keadilan transisi, dukungan kapasitas, dan akses pembiayaan yang memadai. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

7. Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Kesenjangan

Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa pembiayaan. Di sinilah arah baru globalisasi memperlihatkan paradoks tajam. Di satu sisi, pasar keuangan berkelanjutan tumbuh pesat. UNCTAD melaporkan bahwa pasar keuangan berkelanjutan mencapai lebih dari US\$8,2 triliun pada 2024, naik 17 persen dibanding 2023. Penerbitan obligasi berkelanjutan global menembus lebih dari US\$1 triliun, dan dana berkelanjutan mencapai sekitar US\$3,2 triliun. Ini menunjukkan bahwa pasar telah menciptakan instrumen baru untuk menghubungkan modal dengan agenda keberlanjutan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan jauh lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. OECD memperingatkan bahwa tanpa reformasi signifikan, kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan dapat meningkat menjadi US\$6,4 triliun pada 2030. Dengan kata lain, walaupun keuangan berkelanjutan berkembang, laju pertumbuhannya belum cukup untuk

menutup kebutuhan yang sangat besar, terutama di negara berkembang yang menghadapi beban utang, biaya modal tinggi, dan keterbatasan fiskal. ([OECD](#))

Ini berarti arah baru globalisasi finansial belum sepenuhnya berpihak pada pembangunan berkelanjutan. Modal cenderung tetap mengalir ke yurisdiksi dan proyek yang paling siap, paling aman, dan paling mudah dinilai. Sementara itu, proyek-proyek yang sangat dibutuhkan di negara miskin—seperti air, sanitasi, energi pedesaan, adaptasi iklim, dan infrastruktur sosial—sering kali menghadapi hambatan pembiayaan yang lebih besar. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Karena itu, tantangan pembangunan berkelanjutan bukan hanya memperbesar volume modal, tetapi memperbaiki arsitektur pembiayaan global. Diperlukan kombinasi instrumen pasar, pembiayaan campuran, reformasi lembaga pembangunan, penjaminan risiko, dan dukungan kapasitas proyek agar negara berkembang tidak terus berada di pinggir arus modal hijau. Jika tidak, globalisasi finansial baru hanya akan mempercepat transisi di sebagian dunia, sementara bagian dunia lain tertinggal. ([OECD](#))

8. Inovasi, Teknologi, dan Pusat Kekuasaan Baru

Arah baru globalisasi sangat terkait dengan inovasi. WIPO dalam *Global Innovation Index 2025* menunjukkan bahwa peta inovasi global tetap didominasi negara-negara maju, tetapi juga menampilkan dinamika baru: China masuk 10 besar untuk pertama kali, sementara sejumlah ekonomi berpendapatan menengah termasuk pendaki tercepat sejak 2013. Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi menjadi arena kompetisi strategis yang semakin penting bagi posisi suatu negara dalam ekonomi global. ([WIPO](#))

UNCTAD memperingatkan bahwa AI berpotensi menjadi pasar bernilai US\$4,8 triliun pada 2033, tetapi manfaatnya sangat terkonsentrasi. Belanja R&D korporat global banyak terkumpul pada sedikit perusahaan, terutama di Amerika Serikat dan Tiongkok, dan banyak negara belum terwakili dalam

tata kelola AI global. Dengan demikian, teknologi mutakhir dapat menjadi sumber lompatan produktivitas, namun juga sumber konsentrasi kekuasaan yang baru. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, inovasi bisa menjadi akselerator yang sangat kuat. Teknologi dapat memperbaiki efisiensi energi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, mengoptimalkan pertanian, memperkuat sistem peringatan dini iklim, dan menurunkan biaya layanan publik. OECD menunjukkan bahwa kebijakan inovasi di banyak negara kini semakin diarahkan pada sasaran transformatif seperti transisi hijau, inklusi sosial-regional, dan digitalisasi. Ini berarti inovasi bukan lagi hanya instrumen daya saing, tetapi juga instrumen penyelesaian masalah kolektif. ([WIPO](#))

Namun inovasi hanya mendukung pembangunan berkelanjutan bila dikelola secara inklusif. Tanpa pendidikan, infrastruktur digital, kebijakan persaingan, dan tata kelola data yang baik, manfaat inovasi cenderung terpusat. Maka, arah baru globalisasi teknologi menuntut bukan hanya akses kepada perangkat, tetapi juga akses kepada pembelajaran, riset, regulasi, dan kapasitas institusional. ([Human Development Reports](#))

9. Pengaruh Arah Baru Globalisasi terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Dari uraian di atas, pengaruh arah baru globalisasi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat dilihat melalui empat dimensi utama.

Pertama, dimensi produktivitas. Globalisasi baru dapat meningkatkan produktivitas melalui penyebaran teknologi, standar mutu, akses pasar jasa, dan investasi energi bersih. Negara yang mampu mengintegrasikan diri ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi akan memperoleh manfaat besar berupa peningkatan efisiensi, pembelajaran industri, dan penciptaan lapangan kerja baru. ([World Trade Organization](#))

Kedua, dimensi distribusi. Manfaat globalisasi baru tidak otomatis merata. Konsentrasi proyek digital pada sedikit negara, turunnya FDI global, dan

dominasi standar yang kompleks dapat memperlebar jurang antara negara yang siap dan yang tertinggal. Jika pembangunan kapasitas tidak dipercepat, globalisasi baru dapat menciptakan “kelas satu” dan “kelas dua” dalam ekonomi dunia. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Ketiga, dimensi lingkungan. Pergeseran investasi ke energi bersih dan semakin eratnya hubungan antara perdagangan dan rencana iklim memberikan peluang besar bagi dekarbonisasi ekonomi. Tetapi peluang ini hanya akan berdampak sistemik jika disertai skala pembiayaan yang cukup, transfer teknologi, dan kebijakan industrial yang koheren. Tanpa itu, pembangunan hijau akan tetap terfragmentasi. ([IEA](#))

Keempat, dimensi institusional. Arah baru globalisasi mendorong semakin besarnya arti tata kelola, data, dan standar. Negara yang institusinya lemah akan kesulitan memenuhi standar, menarik pembiayaan, mengelola teknologi, dan melindungi kepentingan publik. Dengan demikian, pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak hanya bergantung pada keterbukaan, tetapi juga pada kualitas negara dan kapasitas organisasional. ([World Bank](#))

10. Implikasi Strategis bagi Negara Berkembang

Bagi negara berkembang, arah baru globalisasi menuntut strategi yang lebih cerdas daripada sekadar membuka pasar. Pertama, negara perlu membangun kapasitas standar, termasuk pengujian, sertifikasi, akreditasi, dan sistem data yang andal. Tanpa itu, produk domestik akan sulit masuk ke pasar yang makin menuntut kepatuhan teknis dan keberlanjutan. ([World Bank](#))

Kedua, negara perlu menghubungkan globalisasi dengan transformasi struktural domestik. Ekspor bahan mentah dan ketergantungan pada konsumsi impor tidak cukup untuk membangun ekonomi berkelanjutan. Yang dibutuhkan ialah naik kelas ke manufaktur, jasa modern, dan inovasi yang lebih bernilai tambah. Dinamika yang ditunjukkan WIPO dan WTO

menunjukkan bahwa posisi dalam ekosistem inovasi dan jasa semakin menentukan posisi dalam ekonomi global. ([WIPO](#))

Ketiga, negara berkembang memerlukan strategi pembiayaan yang lebih aktif. Mengingat besarnya SDG financing gap, mereka tidak bisa hanya menunggu pasar. Diperlukan kombinasi reformasi fiskal, penguatan proyek bankable, pembiayaan campuran, dan kerja sama internasional untuk menarik modal jangka panjang ke sektor-sektor berisiko tinggi tetapi penting secara sosial. ([OECD](#))

Keempat, negara perlu memastikan bahwa digitalisasi dan inovasi bekerja untuk manusia. UNDP menegaskan bahwa masa depan pembangunan di era AI bergantung pada pilihan manusia. Artinya, pendidikan, perlindungan sosial, keterampilan, dan kebijakan tenaga kerja harus diposisikan sebagai bagian dari strategi teknologi, bukan sekadar agenda sosial terpisah. ([Human Development Reports](#))

11. Relevansi bagi Indonesia

Bagi Indonesia, arah baru globalisasi memiliki arti strategis yang sangat besar. Sebagai negara berpendapatan menengah dengan pasar domestik besar, sumber daya alam penting, dan ambisi industrialisasi, Indonesia berada pada posisi yang bisa sangat diuntungkan maupun sangat dirugikan oleh perubahan ini. Relevansinya tampak pada tiga bidang.

Pertama, Indonesia perlu menguasai permainan standar. Dalam ekonomi global yang hampir 90 persen perdagangannya dibentuk oleh langkah non-tarif, daya saing ekspor Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada harga, tetapi juga pada mutu, traceability, sertifikasi, dan kapasitas pemenuhan standar keberlanjutan. ([World Bank](#))

Kedua, Indonesia perlu menghubungkan hilirisasi dan industrialisasi dengan globalisasi hijau. Investasi energi bersih yang semakin besar secara global menunjukkan bahwa masa depan nilai tambah tidak akan terletak pada ekstraksi semata, tetapi pada pengolahan, teknologi, dan integrasi ke

rantai nilai hijau. Ini menuntut kebijakan industri yang lebih konsisten, pembangunan SDM, dan infrastruktur energi yang lebih bersih. ([IEA](#))

Ketiga, Indonesia perlu memastikan bahwa digitalisasi dan inovasi tidak hanya dinikmati oleh segelintir sektor dan wilayah. Pengalaman global memperlihatkan bahwa ekonomi digital cenderung terkonsentrasi. Karena itu, pembangunan konektivitas, literasi digital, riset terapan, dan ekosistem kewirausahaan harus diposisikan sebagai agenda pemerataan kesempatan. Hanya dengan cara itu globalisasi baru dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Kesimpulan

Arah baru globalisasi memperlihatkan bahwa dunia tidak sedang keluar dari keterhubungan internasional, tetapi sedang memasuki bentuk keterhubungan yang berbeda. Globalisasi kini makin diatur oleh standar, semakin digerakkan oleh jasa dan data, semakin dibayangi ketahanan rantai pasok dan geopolitik, semakin dipengaruhi transisi hijau, dan semakin terkait dengan inovasi teknologi. IMF, WTO, World Bank, UNCTAD, IEA, dan PBB semuanya menunjukkan bahwa ekonomi global tetap bergerak, tetapi dengan struktur insentif, risiko, dan peluang yang baru. ([IMF](#))

Pengaruh perubahan ini terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan bersifat ambivalen. Pada satu sisi, arah baru globalisasi menyediakan peluang besar untuk peningkatan produktivitas, transformasi energi, inovasi, dan perluasan layanan. Pada sisi lain, ia membawa risiko ketimpangan baru: dominasi standar yang berat sebelah, konsentrasi teknologi, ketimpangan investasi, dan lemahnya representasi negara berkembang dalam tata kelola global. Karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai hanya dengan membiarkan globalisasi bergerak sendiri. Ia memerlukan strategi negara, kapasitas institusional, pembiayaan yang adil, dan kerja sama internasional yang lebih inklusif. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Makalah ini menegaskan bahwa tantangan utama abad ke-21 bukan memilih antara globalisasi atau pembangunan berkelanjutan. Tantangan yang sesungguhnya adalah menyatukan keduanya. Keterbukaan ekonomi harus diarahkan untuk membangun kapabilitas domestik, bukan sekadar ketergantungan. Standar harus dipakai untuk menaikkan mutu dan keberlanjutan, bukan hanya menjadi penghalang baru. Inovasi harus dipandu agar memperluas kesejahteraan manusia, bukan hanya mempercepat konsentrasi keuntungan. Dengan demikian, arah baru globalisasi baru akan menjadi landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan apabila ia ditata sebagai proyek transformasi yang produktif, hijau, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. ([World Bank](#))

Glosarium

Globalisasi

Proses keterhubungan lintas negara melalui perdagangan, investasi, teknologi, data, jasa, dan institusi. Dalam konteks mutakhir, globalisasi semakin dipengaruhi standar, digitalisasi, dan geopolitik. ([World Bank](#))

Pembangunan ekonomi berkelanjutan

Proses peningkatan kesejahteraan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan ketahanan jangka panjang, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. ([UNSD](#))

Langkah non-tarif

Kebijakan selain tarif bea masuk yang memengaruhi perdagangan, seperti standar teknis, sertifikasi, aturan keselamatan, dan persyaratan pelaporan. ([World Bank](#))

Standar

Aturan atau spesifikasi bersama yang membuat produk, sistem, dan proses

dapat diukur, dipercaya, dan dioperasikan secara konsisten lintas pasar.
([World Bank](#))

Ekonomi digital

Aktivitas ekonomi yang bertumpu pada teknologi digital, data, layanan digital, dan konektivitas. UNCTAD mencatat sektor ini tumbuh lebih cepat dari PDB global, tetapi sangat terkonsentrasi. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Rantai pasok

Jaringan aktivitas yang menghubungkan bahan baku, produksi, distribusi, dan konsumsi suatu barang atau jasa. Dalam globalisasi baru, ketahanan rantai pasok menjadi isu utama. ([World Trade Organization](#))

Transisi hijau

Peralihan menuju sistem ekonomi dan energi yang lebih rendah emisi, lebih efisien sumber daya, dan lebih berkelanjutan secara ekologis. ([IEA](#))

NDC (Nationally Determined Contributions)

Komitmen nasional negara-negara di bawah Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi dan/atau beradaptasi terhadap perubahan iklim. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

SDG financing gap

Kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan untuk mencapai SDGs dan sumber daya yang benar-benar tersedia. OECD memperkirakan gap ini dapat mencapai US\$6,4 triliun pada 2030 tanpa reformasi signifikan. ([OECD](#))

Inovasi

Penciptaan atau penerapan pengetahuan, teknologi, proses, atau model bisnis baru untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan pemecahan masalah sosial-ekonomi. ([WIPO](#))

Kapasitas institusional

Kemampuan negara, lembaga, dan organisasi untuk merancang,

melaksanakan, dan menegakkan kebijakan, termasuk dalam bidang standar, pembiayaan, dan tata kelola teknologi. ([World Bank](#))

Referensi (APA 7)

International Energy Agency. (2025). *World energy investment 2025*. IEA.

International Monetary Fund. (2026). *World economic outlook update, January 2026: Global economy—Steady amid divergent forces*. IMF.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Global outlook on financing for sustainable development 2025*. OECD Publishing.

United Nations Conference on Trade and Development. (2025a). *Trade policies to advance national climate plans*. UNCTAD.

United Nations Conference on Trade and Development. (2025b). *World investment report 2025: International investment in the digital economy*. UNCTAD.

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI*. UNDP.

United Nations Statistics Division. (2025). *The sustainable development goals report 2025*. United Nations.

World Bank. (2025). *World development report 2025: Standards for development*. World Bank.

World Intellectual Property Organization. (2025). *Global innovation index 2025*. WIPO.

World Trade Organization. (2026). *Global trade outlook and statistics: March 2026*. WTO.

Rudy C Tarumingkeng: *Arah Baru Globalisasi dan Pengaruhnya
terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 3 April
2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69cf50a0-7368-8398-bf14-cf63af1db4f9>